

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah memperoleh banyak pengalaman politik dan ekonomi. Peralihan dari orde lama ke orde baru tidak hanya memberikan iklim politik yang lebih dinamis, tetapi juga kehidupan ekonomi yang lebih baik. Pengisian kemerdekaan selama orde lama lebih bertumpu pada urusan politik pada masa orde baru beralih ke urusan ekonomi (Dumairy, 1996, 1).

Tahun 1966 merupakan tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia, bukan saja dalam konteks politik tapi juga dalam konteks ekonomi. Tahun tersebut menandai permulaan orde baru. Perekonomian Indonesia memulai babak sejarah baru yang signifikan sejak itu. Meskipun perjalanan ekonomi sejak orde baru, termasuk semua prestasi pembangunannya tidak layak dipisahkan sama sekali dari masa-masa sebelumnya, namun pembahasan secara tersendiri perekonomian selama masa-masa sebelum orde baru sangat berharga untuk memahami perekonomian Indonesia secara utuh. Hal ini bukan saja karena selama masa itu pengisian kemerdekaan lebih ditekankan pada aspek politik, sehingga aspek ekonominya relatif tertinggal, tetapi juga miskinnya pendataan mengenai keadaan ekonomi yang memang sudah tertinggal tersebut. Di samping itu kebanyakan pakar ekonomi (domestik maupun asing) yang menelaah

perekonomian Indonesia lebih tertarik untuk mengulas keadaan semasa atau setelah orde baru. (Dumairy, 1996, 14).

Masalah stabilitas menjadi hal penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Stabilitas ekonomi menjadi bahan perdebatan di kalangan ekonomi dibanyak negara, baik di negara maju maupun di negara-negara sedang berkembang (NSB) didunia karena masalah ini setiap tahun muncul di belahan dunia. Perekonomian suatu nagara tidak pernah lepas dari masalah fluktuasi ekonomi atau ketidakstabilan ekonomi termasuk juga Indonesia. Ketidakstabilan ekonomi terus berlanjut akan menimbulkan masalah-masalah seperti pengangguran yang tinggi, inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi yang rendah dan masalah neraca pembayaran (Suparmin, 2000, 1).

Untuk melihat laju pembangunan ekonomi suatu negara dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakatnya maka pertumbuhan produk domestik bruto dan pendapatan perkapita dari waktu ke waktu harus dihitung dengan cara menjumlahkan nilai produksi barang-barang dan jasa yang dihasilkan suatu perekonomian negara dalam waktu satu tahun. Meskipun bukan merupakan salahsatu ukuran menilai prestasi ekonomi suatu negara, namun cukup representatif dan sangat lazim digunakan. Produk domestik bruto tidak hanya berguna untuk menilai perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu tetapi juga membandingkan perkembangan ekonomi suatu negara dengan negara lain. Rinciannya secara sektoral dapat menerangkan struktur perekonomian negara yang bersangkutan. Dari angka produk domestik bruto juga dapat diperoleh

turunannya *derived measures*-nya seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita (Dumairy, 1996, 37).

Pertumbuhan ekonomi dikatakan mengalami peningkatan apabila tingkat kegiatan ekonomi negara tersebut lebih tinggi dari periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari peningkatan produk domestik bruto riil per tahun, dimana PDB riil merupakan nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi suatu negara dalam waktu satu tahun (Sukirno, 1995, 17).

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di kawasan Asia pada tahun 1968 produk domestik brutonya masih sangat rendah, sekitar 60 US\$ per kapita. Jauh lebih rendah dibandingkan produk domestik bruto negara-negara berkembang pada saat itu, seperti India produk domestik bruto sekitar 186 US\$ perkapita, Bangladesh 173 US\$, dan Pakistan 192 US\$. Sejak Pelita I tahun 1968 dimulainya produk domestik bruto Indonesia mengalami peningkatan yang relatif tinggi setiap tahun, dan pada tahun 1980-an telah mendekati 500 US\$. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan PDB rata-rata per tahun juga tinggi 7 hingga 8 persen selama tahun 1970 sampai 1980-an, proses pembangunan ekonomi di Indonesia tidak tanpa mengalami banyak *shocks* yang cukup serius, yang terutama disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti merosotnya harga minyak mentah di pasaran internasional menjelang pertengahan tahun 1980-an dan resesi ekonomi dunia pada dekade yang sama (Tambunan, 2001, 11).

Sejak pelita I hingga krisis ekonomi terjadi yang diawali oleh krisis rupiah pada pertengahan tahun 1997, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dilihat dari PDB riil selama

tahun 1969 sampai pertengahan tahun 1997 (sebelum krisis moneter) yang terus meningkat dari Rp. 49.445 miliar pada tahun 1969 menjadi Rp.433.245,9 miliar pada tahun 1997 dan selama periode tersebut terjadi pertumbuhan sebesar 6.87% per tahun.

**TABEL 1.1**  
**PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK DI INDONESIA**  
**1984-2004**

Tahun	Indeks Harga		Produk Domestik Bruto		Δ %
	Inflasi	IHK	Harga Berlaku	Harga Konstan*)	
1984	10.47	49.49	89885	181622.6	10.41
1985	4.73	51.83	94491.5	187144.13	3.04
1986	5.83	54.85	96489.3	197206.2	-3.5
1987	9.30	59.95	124846.9	208201.67	11.22
1988	8.04	64.77	142020.3	237877.66	10.99
1989	6.41	68.92	166324.5	260565.87	12.76
1990	12.49	77.53	195597.2	271979.88	4.38
1991	9.34	84.77	227502.3	291879.08	8.42
1992	7.56	91.18	260786.3	309711.56	5.03
1993	9.67	100.00	329775	329775	6.48
1994	8.48	108.48	382219.7	352341.45	6.84
1995	9.47	118.75	452380.9	382148.63	8.63
1996	10.04	130.67	532568	407567.15	6.48
1997	6.20	138.77	627695.4	458790.16	10.6
1998	48.48	198.47	1002333	373074	-13.3
1999	20.5	202.45	1099731.6	379352	0.92
2000	9.15	221.37	1264918.7	398016.9	4.92
2001	12.55	249.15	1467654.8	411753.5	3.45
2002	10.03	274.13	1808761.6	428947.2	3.69
2003	5.06	109.83	1966224.9	444453.5	3.61
2004	6.40	116.86	2223982.7	476947.45	7.3

Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS), edisi 1984-2004

Keterangan : \*) Berdasarkan harga konstan tahun 1993.

: Untuk data tahun 2003 dan 2004, IHK gabungan 45 kota berdasarkan tahun dasar 2002=100

Dampak krisis yang terjadi pada pertengahan 1997 pendapatan perkapita Indonesia menurun drastis dari 800 US\$ pada tahun 1993 turun menjadi 640 US\$ pada tahun 1998 dan 580 US\$ pada tahun 1999. Tahun 2000 perekonomian Indonesia mulai membaik dengan pendapatan perkapita naik menjadi 640 US\$ dan 725 US\$ pada tahun 2001 (Tambunan, 2001, 16).

Data yang ditunjukkan pada tabel 1.1 merupakan hasil pengukuran output nasional berdasarkan harga berlaku dan harga konstan serta pertumbuhannya yang dituliskan sebagai perubahan. Deregulasi pada tahun 1987 tidak memberikan dampak yang terlalu signifikan terhadap perubahan kinerja perekonomian hingga awal dekade 1990-an. Pertumbuhan ekonomi hanya mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada tahun 1987 sebesar 11,22 persen. Pihak pemerintah dengan serangkaian kebijakan ekonominya masih menginginkan tercapainya asumsi pertumbuhan selama 5 persen seperti yang terjadi pada dekade 1970-an. Namun upaya ini masih juga belum mampu menurunkan tingkat inflasi rata-rata di bawah 5 persen per tahunnya, bahkan pada tahun 1990 tingkat inflasi mendekati angka 10 persen.

Dari data pada tabel 1.1 terlihat bahwa pendapatan perkapita selama periode tahun 1985 sampai tahun 1996 cukup baik dan terus meningkat. Sampai pada periode pertama tahun 1997, perekonomian Indonesia kemudian mengalami perubahan mendadak setelah pertengahan tahun 1997 muncul masalah yang menghantam valuta asing di kawasan Asia, yang diawali dengan guncangan pasar valuta asing di Thailand dan menjalar ke pasar valuta asing negara-negara lain termasuk Indonesia pada akhir periode tahun 1997, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS

mencapai angka 68,7%. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tersebut menyebabkan laju pertumbuhan PDB (nilai riil) Indonesia negatif 13,1% pada tahun 1998 dan berdampak negatif pada posisi neraca pembayaran, terutama karena jumlah utang luar negeri makin membengkak dimana pada tahun 1998 total menjadi 95,3% terhadap GDP (Damajanti,2000, 1). Pada tahun 1999 perekonomian Indonesia sedikit membaik dengan laju pertumbuhan diatas 0 persen, maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 2000 sampai tahun 2002 proses pemulihan perekonomian Indonesia jauh lebih baik dengan laju pertumbuhan diatas 3% (Tambunan,2001, 20).

Pemerintah Indonesia harus tetap menjaga stabilitas ekonomi makro dan terus berupaya meningkatkan produk domestik bruto dengan menempuh serangkaian kebijakan. Salah satu wujud dari kebijakan ekonomi makro adalah kebijakan moneter, kebijakan tersebut sebagai bagian integral dari kebijakan ekonomi makro, merupakan salah satu komponen penting dalam perangkat kebijakan ekonomi nasional di Indonesia, yaitu untuk menimbulkan dampak positif terhadap produk domestik bruto serta dimaksudkan untuk menjaga kestabilan relatif harga-harga domestik dan nilai tukar rupiah dalam hubungannya dengan mata uang asing. (Arief, 1993, 203). Dalam sektor moneter, keseimbangan pasar uang akan tercapai apabila permintaan akan uang sama dengan penawaran akan uang. Permintaan uang maupun penawaran uang masing-masing dipengaruhi oleh variabel independen mungkin bisa sama atau juga berbeda. Otoritas moneter selalu yang berhak mengatur jumlah uang beredar hendaknya bisa mendeteksi variabel-variabel yang berpengaruh pada permintaan uang dalam masyarakat. Dengan mengetahui variabel-variabel tersebut

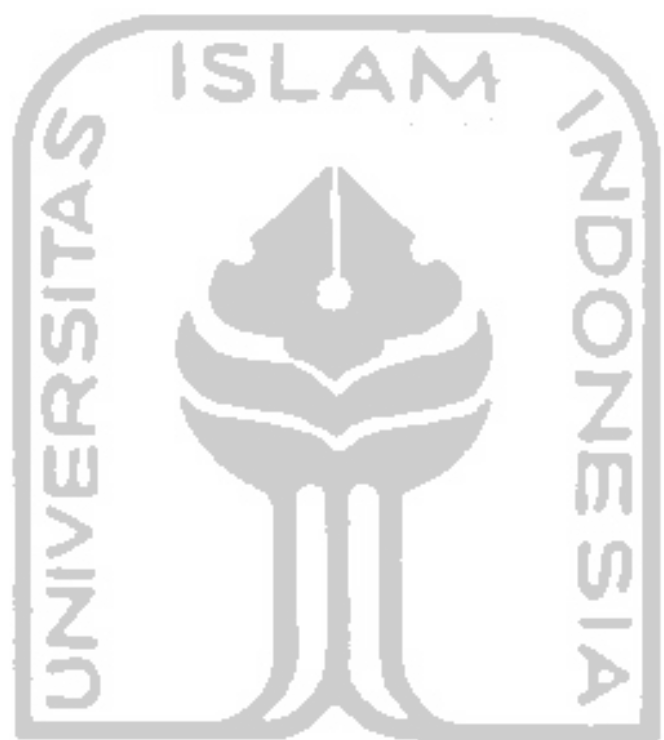
pemerintah diharapkan dapat menentukan kebijakan lebih lanjut, sehingga permintaan uang dan penawaran uang dalam masyarakat jangan sampai terjadi kekurangan, baik jumlah uang yang diminta untuk transaksi, berjaga-jaga, maupun untuk spekulasi. Karena terjadinya kekurangan uang yang diminta bisa mengganggu kegiatan perekonomian Indonesia.

**TABEL 1.2**  
**PERKEMBANGAN M1, UANG KUASI, DAN M2 DI INDONESIA**  
**1984-2004**

Tahun	M1			Uang kuasi			M2		
	Nominal	Riil	% $\Delta$	Nominal	Riil	% $\Delta$	Nominal	Riil	% $\Delta$
1984	8581	17338,9	2,6	9348,1	18888,8	19,8	17887,1	36142,9	10,4
1985	10104	19494,5	12,4	13094,6	25264,5	33,6	23279,2	44914,6	24,3
1986	11677	21289	9,2	16018,5	29204,2	15,6	27724,3	50545,7	12,5
1987	12685	21159	-0,6	21218,9	35394,3	21,2	33825,4	56422,7	11,6
1988	14392	22220,2	5	28120	43415,2	22,7	42748,1	65999,9	17
1989	20114	29184,6	31,3	38214,6	55447,8	27,7	57403,2	83289,7	26,2
1990	23819	30722,3	5,3	55050,6	71005,6	28,1	76731,5	98970,1	18,8
1991	26341	31073,5	1,1	63003,7	74323,1	4,7	85748,7	101154,6	2,2
1992	28779	31562,8	1,6	84718,5	92913,5	25	111828,4	122645,8	21,2
1993	36805	36805	16,6	101570,7	101570,7	9,3	135867,3	135867,3	10,8
1994	45374	41827,1	13,6	118870,4	109578,2	7,9	160532,4	147983,4	8,9
1995	52677	44359,6	6,1	159534,4	134344,8	22,6	209076,4	176064,4	19
1996	64089	49046,5	10,6	202908,4	155283,1	15,6	260958,3	199707,9	13,4
1997	78343	56445,3	15,1	305872,4	220416,8	41,9	392192,3	282620,4	41,5
1998	101197	46015,4	-18,5	469055,1	213284,4	-3,2	568796,7	258638	-8,5
1999	124633	47031,3	2,2	494879,2	186746,9	-12,4	613650,2	231566,1	-10,5
2000	162186	56069,3	19,2	574273,1	198531,8	6,3	733652,8	253630,9	9,5
2001	177731	54592,4	-2,6	659476,1	202566,7	2	836302,7	256881,3	1,3
2002	191939	53584,3	-1,8	692305,2	193273,4	-4,6	883896,6	246760,6	-3,9
2003	223799	54667,4	1,9	731893	205357,5	5,8	955692	289852,2	14,8
2004	253818	55352,6	1,2	779709	212456,7	3,3	1033527	303609,8	4,5

Sumber: - Biro Pusat Statistik (BPS), berbagai edisi, diolah.  
- Statistik Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia, berbagai edisi, diolah.

Keterangan: Nilai riil berdasarkan harga konstan 1993.



جامعة الإسلام في إندونيسيا



Kebijakan yang pernah dilakukan pemerintah adalah kebijakan uang ketat atau *Tight Money Policy* (TMP). Kebijakan moneter dari sisi penawaran ini diarahkan untuk memelihara keseimbangan antara jumlah uang beredar dengan jumlah barang yang tersedia agar kestabilan harga terjaga. Sedangkan kebijakan moneter yang dilaksanakan pemerintah setelah kebijakan uang ketat adalah kebijakan pemerintah yang bersifat ekspansi atau *Easy Money Policy* (EMP). Kebijakan ini terutama mendorong pertumbuhan ekonomi atau peningkatan produk domestik bruto.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1) di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, bahkan pada pertengahan tahun 1997 dimana saat itu perekonomian Indonesia mengalami krisis moneter, dengan laju pertumbuhan produk domestik bruto negatif 13,7% tetapi jumlah uang beredar malah mengalami peningkatan yang sangat besar dari 7.843 miliar rupiah tahun 1997 menjadi 10.1197 miliar rupiah tahun 1998. Hal ini disebabkan turunnya nilai rupiah terhadap dollar AS, yang mengakibatkan harga sejumlah barang kebutuhan pokok masyarakat naik sehingga meningkatkan jumlah uang beredar di masyarakat, ini yang menyebabkan perekonomian Indonesia dari segi moneter tidak stabil.

Jumlah uang beredar naik akan berdampak pada suku bunga cenderung turun dan jumlah pemberian kredit akan bertambah. Oleh karenanya, akan lebih menguntungkan untuk melakukan investasi baru sehingga pengeluaran untuk investasi akan meningkat. Hal ini menyebabkan kenaikan pendapatan dan harga. Pendapatan juga bisa mempengaruhi jumlah uang beredar yaitu apabila pendapatan

kita meningkat, nilai barang dan jasa yang kita beli juga meningkat, yang menyebabkan jumlah uang beredar juga meningkat. Dalam menanggapi hubungan kausalitas antara jumlah uang beredar dengan produk domestik bruto, awam cenderung berpendapat bahwa tambahan jumlah uang beredar menyebabkan kenaikan pendapatan nasional, bukan sebaliknya. Kenaikan pendapatan jumlah uang beredar menyebabkan tambahan jumlah uang beredar. Pendapat umum tersebut didasari oleh dugaan kausalitas (sebab-akibat) yang paling memungkinkan terjadi antara kedua variabel di atas. Pendapat tersebut juga selaras dengan atau mungkin dipengaruhi oleh pandangan kaum klasik. Kaum klasik menyatakan jika ada tambahan jumlah uang beredar maka meningkatkan produk domestik bruto (Samuelson dan Nordhaus, 1986).

Berdasarkan uraian yang telah ditulis di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti apakah terdapat hubungan kausalitas antara jumlah uang beredar dengan produk domestik bruto, penulis juga ingin mengetahui pola atau arah hubungan di antara produk domestik bruto dan jumlah uang beredar.

## 1.2. Rumusan Masalah.

Apakah terjadi hubungan kausalitas atau tidak dan bagaimana pola atau arah kausalitas antara Jumlah Uang Beredar dengan Produk Domestik Bruto di Indonesia tahun 1985-2004.

### 1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apakah terjadi hubungan kausalitas atau tidak antara Jumlah Uang Beredar dengan Produk Domestik Bruto di Indonesia
2. Bagaimana pola atau arah kausalitas antara Jumlah Uang Beredar dengan Produk Domestik Bruto di Indonesia tahun 1984-2004.

### 1.4. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai jenjang strata satu (S1) Jurusan IESP Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Bagi peneliti menambah pengetahuan yang selama ini didapat di bangku kuliah yang kemudian dikembangkan dalam bentuk penelitian.
3. Bagi pemerintah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan moneter agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan efektif.

### 1.5. Sistematika Penulisan

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

Bab ini merupakan uraian atau gambaran atau deskripsi secara umum tentang perkembangan jumlah uang beredar dan produk domestik bruto di Indonesia.

## BAB III KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi pendokumentasian dan pengkajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama.

## BAB IV LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi dua bagian; pertama tentang landasan teori yang berisikan teori pendapatan nasional dan teori jumlah uang beredar; kedua berisi tentang formalisasi hipotesis hubungan kausalitas antara jumlah uang beredar dengan produk domestik bruto.

## BAB V METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam menganalisis kausalitas antara jumlah uang beredar dengan produk domestik bruto.

## BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian dan hasil analisa, pengolahan data serta pengujian statistik

## BAB VII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini berisi dua bagian; pertama merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis, kedua merupakan hasil dari simpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

